

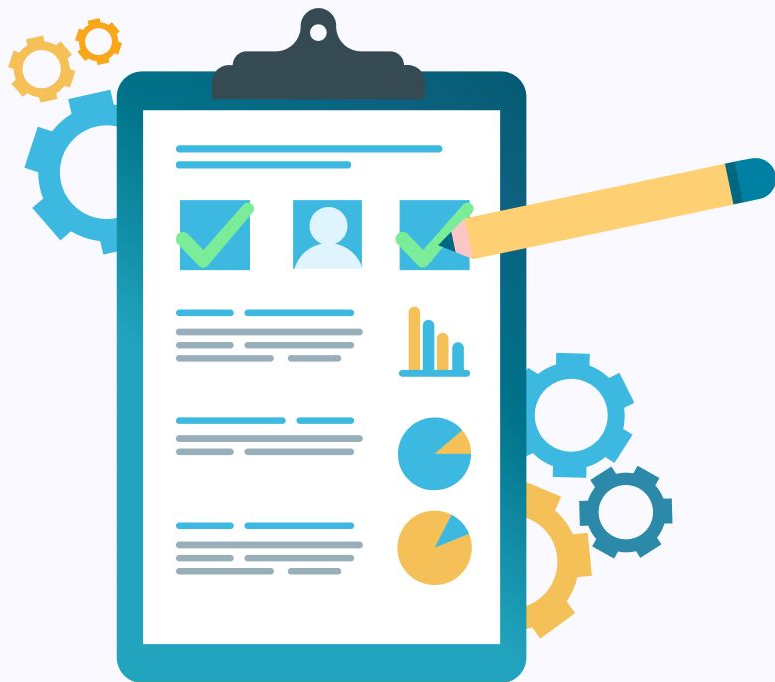


CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

Google

Rilis Survei Opini Publik: Proyeksi dan Mitigasi Penyebaran Gangguan Informasi dalam Pemilu 2024

Departemen Politik dan Perubahan Sosial
CSIS, 2023



saferinternetlab.org



[saferinetlab](https://www.instagram.com/saferinetlab)

Latar Belakang



- Gangguan informasi politik telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan integritas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Survei nasional yang representatif dan berkelanjutan diperlukan untuk memahami secara komprehensif skala dan dampak gangguan informasi di Indonesia.
- Penelitian sebelumnya belum mampu menggambarkan sepenuhnya kerentanan pemilih Indonesia terhadap gangguan informasi secara nasional dan representatif. Survei nasional perlu diadakan guna mendapatkan data yang lebih holistik.
- Survei dapat mengidentifikasi faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat kerentanan pemilih tertentu terhadap gangguan informasi, seperti literasi media dan informasi, pola konsumsi sumber informasi, dan ikatan emosional politik (*partisanship*).
- Data hasil survei dapat digunakan untuk merancang program literasi dan edukasi publik yang ditargetkan dan relevan dengan kerentanan berbeda di setiap daerah dan kelompok demografi.
- Survei diperlukan agar upaya mitigasi gangguan informasi politik tidak hanya bersifat reaktif dan temporer, melainkan bersifat proaktif dan berkelanjutan.
- Mengingat masa kampanye Pemilu 2024 akan segera dimulai, hasil survei ini dapat menjadi salah satu referensi bagi pengambil kebijakan untuk menyiapkan langkah mitigasi sebelum gangguan informasi merebak di level pemilih.

Metodologi



Populasi	Populasi survei adalah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Populasi sasaran adalah penduduk Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah saat survei dilakukan.
Sumber Data	Kerangka sampel (<i>sampling frame</i>) berasal dari populasi penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.
Penarikan Sampel	Penarikan sampel sepenuhnya dilakukan secara acak menggunakan metode <i>multistage random sampling</i> . Penarikan sampel mempertimbangkan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah penduduk pada setiap provinsi, proporsi perempuan dan laki-laki, dan kategori daerah <i>urban</i> dan <i>rural</i> .
Jumlah Sampel dan Margin of Error (MoE)	Jumlah sampel sebesar 1.320 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi yang terbesar di 136 <i>primary sampling unit</i> (PSU) pada level desa/kelurahan. Menggunakan 1.320 sample, <i>margin of error</i> survei ini sebesar +/- 2,7% , pada tingkat kepercayaan 95% .
Wawancara	Proses wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh enumerator.
Kendali Mutu	Kendali mutu dilakukan secara berlapis mulai dari proses rekrutmen, pelaksanaan <i>training</i> enumerator, pengumpulan data, <i>spotcheck</i> lapangan, hingga validasi dan verifikasi pasca pengumpulan data (<i>call-back</i>).
Periode Survei	4-10 September 2023
Keanggotaan Profesi	Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI).

Validasi Sampel dan Populasi: Provinsi



Kode	Nama Provinsi	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2023)	Kode	Nama Provinsi	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2023)
1	ACEH	2,0	1,9	18	NUSA TENGGARA BARAT	2,0	1,9
2	SUMATERA UTARA	5,5	5,3	19	NUSA TENGGARA TIMUR	2,0	1,9
3	SUMATERA BARAT	2,0	2,3	20	KALIMANTAN BARAT	2,0	2,3
4	RIAU	2,4	2,3	21	KALIMANTAN TENGAH	1,0	0,8
5	JAMBI	1,3	1,5	22	KALIMANTAN SELATAN	1,5	1,5
6	SUMATERA SELATAN	3,1	3,0	23	KALIMANTAN TIMUR	1,4	1,5
7	BENGKULU	0,7	0,8	24	KALIMANTAN UTARA	0,3	0,4
8	LAMPUNG	3,3	3,0	25	SULAWESI UTARA	1,0	0,8
9	KEP. BANGKA BELITUNG	0,5	0,8	26	SULAWESI TENGAH	1,1	1,1
10	KEP. RIAU	0,8	0,8	27	SULAWESI SELATAN	3,4	3,0
11	DKI JAKARTA	3,9	3,8	28	SULAWESI TENGGARA	1,0	0,8
12	JAWA BARAT	17,9	17,8	29	GORONTALO	0,4	0,4
13	JAWA TENGAH	13,5	13,6	30	SULAWESI BARAT	0,5	0,8
14	DI YOGYAKARTA	1,4	1,5	31	MALUKU	0,7	0,8
15	JAWA TIMUR	15,1	15,2	32	MALUKU UTARA	0,5	0,8
16	BANTEN	4,4	4,5	33	PAPUA BARAT	0,4	0,4
17	BALI	1,6	1,5	34	PAPUA	1,6	1,5

Validasi Sampel dan Populasi: Jenis Kelamin, Domisili, dan Karakter Wilayah



Kategori	Populasi (Sensus BPS 2020)	Sampel (2023)
Jenis Kelamin		
Laki-laki	50,58	50,0
Perempuan	49,42	50,0
Domisili		
Pulau Jawa	56,1	56,4
Luar Pulau Jawa	43,9	43,6
Karakter Wilayah		
Perkotaan	56,7	56,4
Perdesaan	43,3	43,6

Susunan Presentasi



Potret Aksesibilitas Internet di Indonesia

Potret Gangguan Informasi di Indonesia

Kerentanan Publik terhadap Gangguan Informasi

Dampak Gangguan Informasi terhadap Pemilu dan Demokrasi

Mitigasi untuk Melawan Penyebaran Gangguan Informasi

Ringkasan Eksekutif



1. Menjelang Pemilu 2024, **tingkat penyebaran gangguan informasi cukup tinggi** dan mengkhawatirkan, hampir setengah dari populasi percaya pada gangguan informasi.
2. **Kerentanan publik** terhadap gangguan informasi masih mengkhawatirkan, dan dapat mempercepat penyebaran gangguan informasi.
3. **Internet eksposur yang tinggi** mempengaruhi peluang seseorang untuk terpapar atau percaya terhadap gangguan informasi.
4. **Gangguan informasi menyebar di banyak platform**, tidak hanya di sosial media, tetapi juga di medium informasi lainnya. Di tengah penyebaran gangguan informasi yang tinggi, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa gangguan informasi adalah **gerakan terorganisir**.
5. Pengaruh tingginya misinformasi mempunyai banyak **dampak buruk pada demokrasi dan pemilu**.
 - Melemahkan dukungan publik pada demokrasi;
 - Menurunkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu dan integritas penyelenggaraan pemilu
6. **Mitigasi untuk melawan penyebaran gangguan informasi masih pekerjaan berat ke depan**.
 - Program literasi digital belum sepenuhnya efektif menurunkan kepercayaan publik pada gangguan informasi.
 - Mekanisme pelaporan gangguan informasi di media sosial belum efektif menarik minat publik.
 - Pentingnya peran kolaborasi pemerintah dan penyedia platform teknologi dalam hal tata kelola internet.

BAGIAN 1

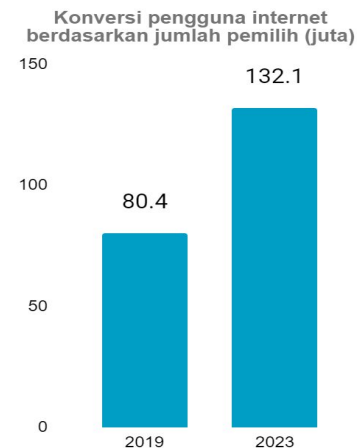
Potret Aksesibilitas Internet di Indonesia



Frekuensi Penggunaan Internet

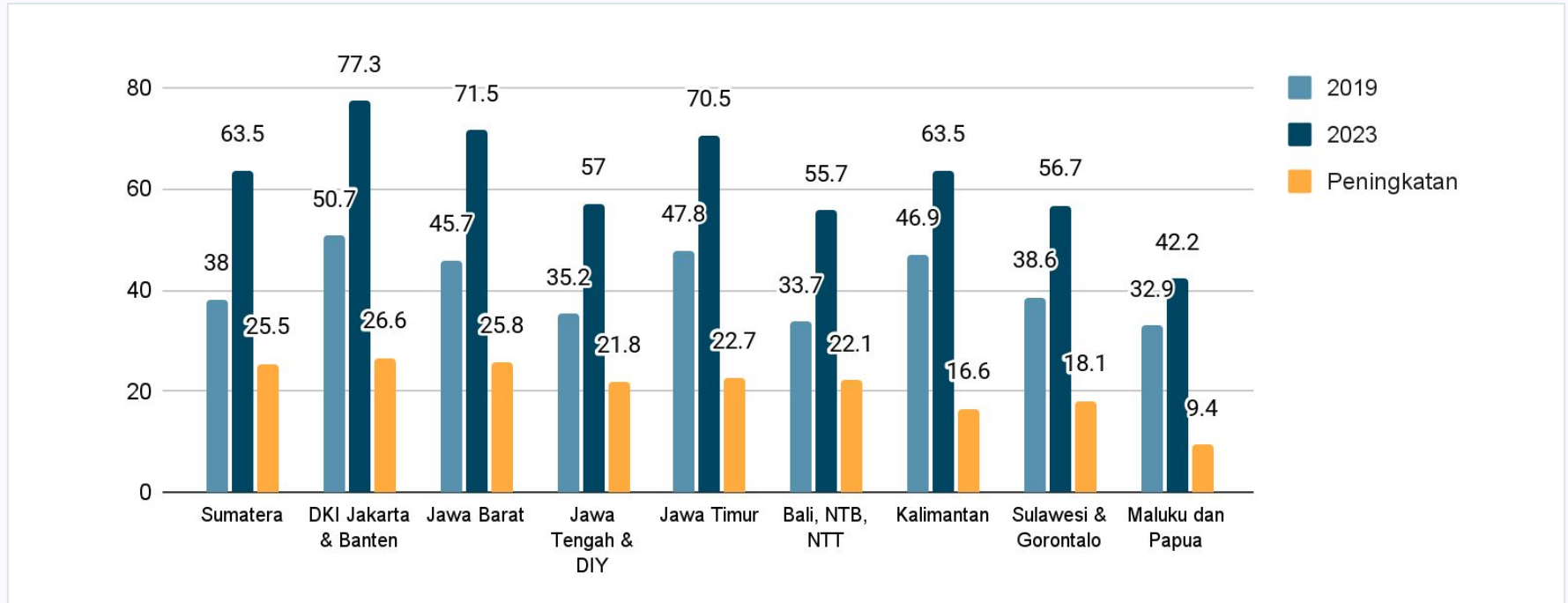


Apakah Anda pernah **mengakses internet** (seperti melihat media sosial, mencari berita di internet) baik melalui telepon pintar (HP) atau computer/laptop dalam **1 (satu) minggu terakhir?**



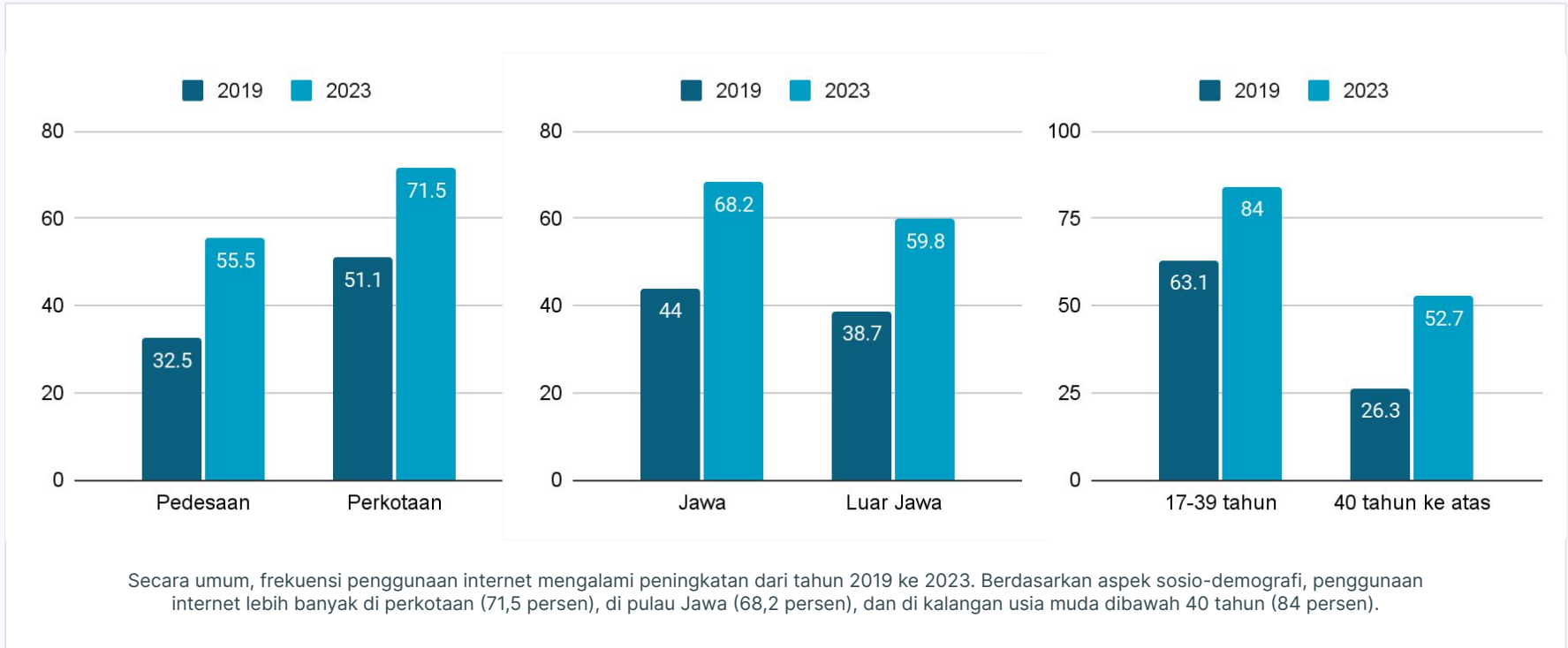
Frekuensi akses internet meningkat dari 41,7 persen menjadi 64,5 persen pada tahun 2019 ke 2023. Jika dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (KPU 2019, 2023) terjadi peningkatan dari 80,4 juta (2019) menjadi 132,1 juta (2023).

Frekuensi Penggunaan Internet Berdasarkan Wilayah



Secara umum, terjadi peningkatan frekuensi akses internet di seluruh wilayah Indonesia dari tahun 2019 ke 2023. Dibandingkan wilayah lain di Indonesia, peningkatan frekuensi akses internet di Indonesia bagian timur masih relatif rendah dari tahun 2019 ke tahun 2023.

Frekuensi Penggunaan Internet Berdasarkan Aspek Sosio-Demografi

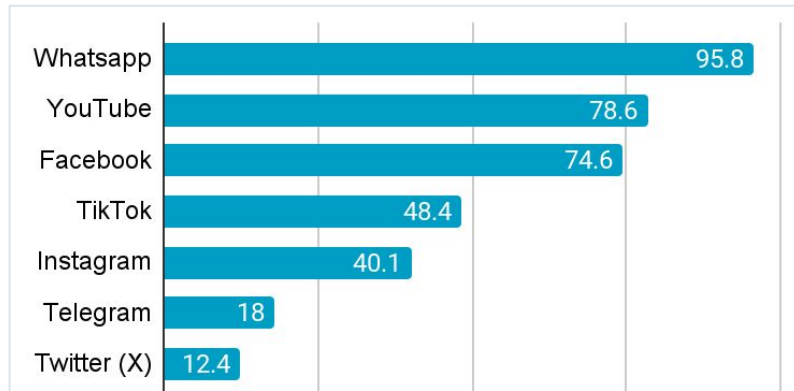


Platform Media Sosial yang Banyak digunakan dan Tingkat Kepercayaan Gangguan Informasi



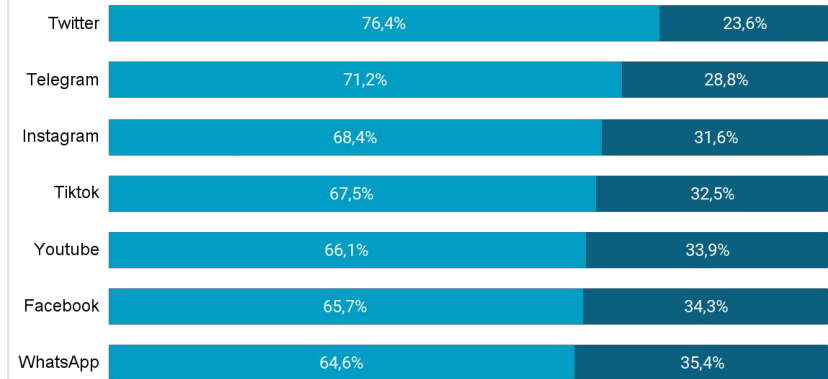
Penggunaan media sosial (N=852)

Seberapa seringkah Anda menggunakan media sosial, aplikasi pesan singkat atau aplikasi berbagi video di bawah ini dalam 1 minggu terakhir? (dalam persen)



Penggunaan media sosial (N=852)

■ Mempercayai gangguan informasi ■ Tidak percaya gangguan informasi

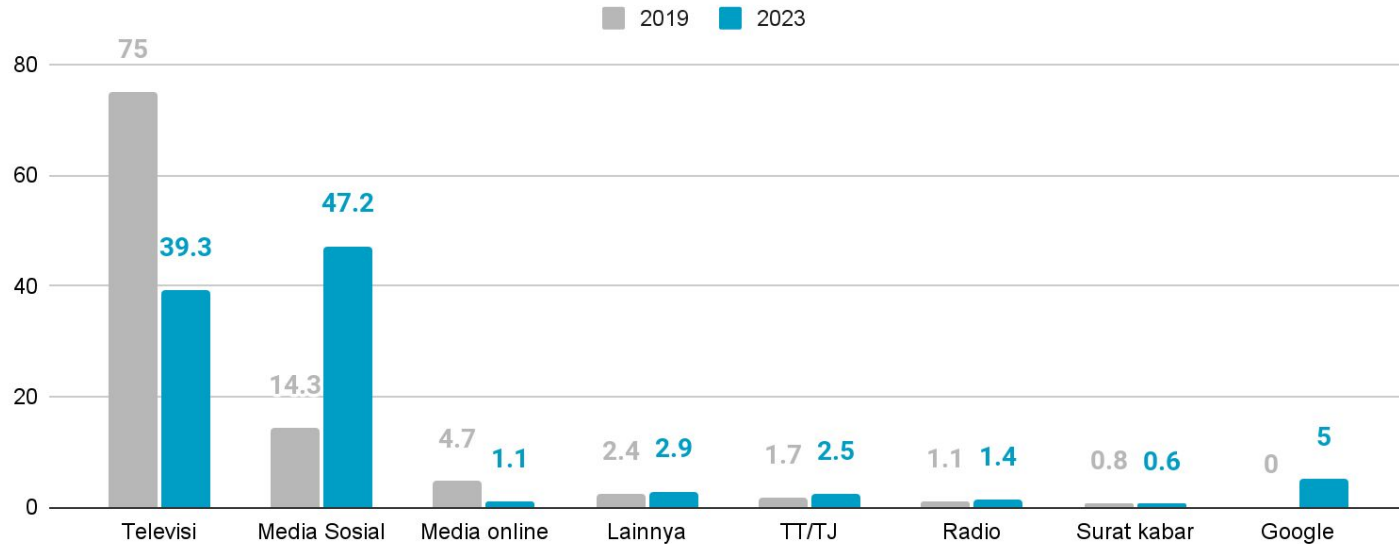


Dibandingkan dengan aplikasi media sosial lain, Twitter (12,4%) dan Telegram (18,0) merupakan platform yang paling sedikit digunakan oleh pemilih. Namun, pengguna kedua media sosial tersebut cenderung lebih percaya terhadap gangguan informasi (Twitter 76,4% dan Telegram 71,2%) dibanding platform lainnya. Faktor paparan terhadap gangguan informasi, kebijakan internal platform, ketersediaan ruang untuk moderasi konten, serta akun-akun non-organik (bot) dapat menjadi faktor-faktor yang meningkatkan kepercayaan terhadap gangguan informasi di kedua platform tersebut.

Sumber Informasi Utama Publik



Manakah di antara sumber informasi di bawah ini yang menjadi rujukan utama Anda untuk mendapatkan informasi? (dalam persen)

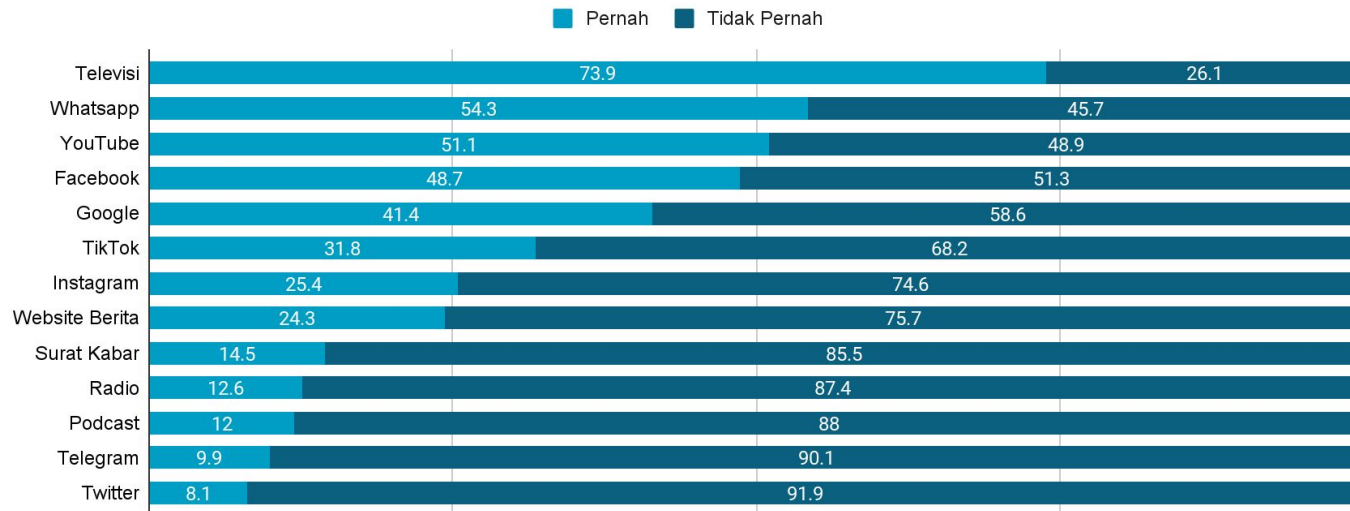


Media sosial telah menjadi sumber informasi utama dibandingkan televisi. Televisi mengalami penurunan dari 75 persen menjadi 39,3 persen sedangkan media sosial mengalami kenaikan dari 14,3 persen menjadi 47,2 persen dari tahun 2019 ke 2023.

Frekuensi Mendapatkan Informasi Politik dari Medium Informasi



Seberapa seringkah Anda **mendapatkan** berita politik dari sumber di bawah ini dalam **1 minggu terakhir?** (dalam persen)



Televisi masih menjadi sumber rujukan utama untuk mendapatkan berita politik (73,9 persen). Baru kemudian selanjutnya dari aplikasi-aplikasi media sosial seperti WhatsApp (54,3 persen), YouTube (51,1 persen), dan Facebook (48,7 persen). Medium-medium informasi lainnya, baik konvensional maupun baru cenderung memiliki segmentasi audiens yang khusus.

BAGIAN 2

Tingkat dan Pengukuran Gangguan Informasi di Indonesia



Pengukuran Kepercayaan pada Gangguan Informasi

Dalam survei ini, kami membacakan sejumlah isu-isu yang sudah terverifikasi sebagai informasi salah.

Responden diminta untuk menjawab apakah mereka **percaya atau tidak** terhadap **isi atau substansi** dari **informasi salah tersebut**.



Pengukuran 1: Kepercayaan Publik terhadap Gangguan Informasi yang Berulang*

Pengukuran terhadap gangguan informasi pemilu

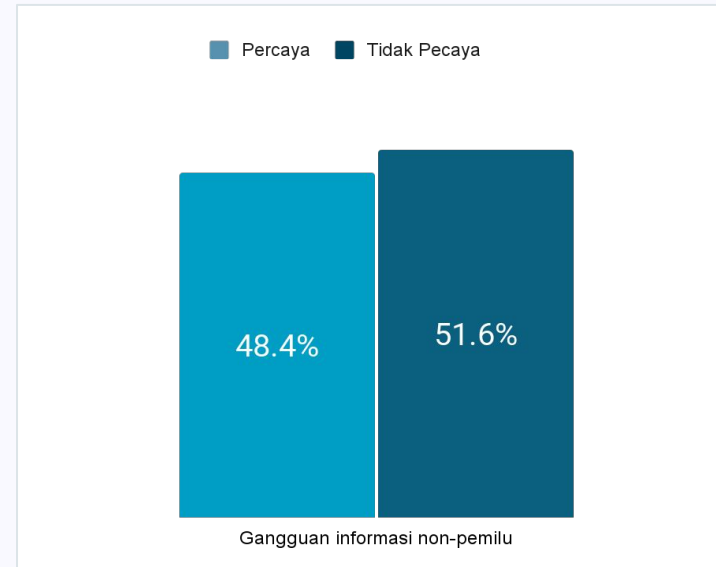
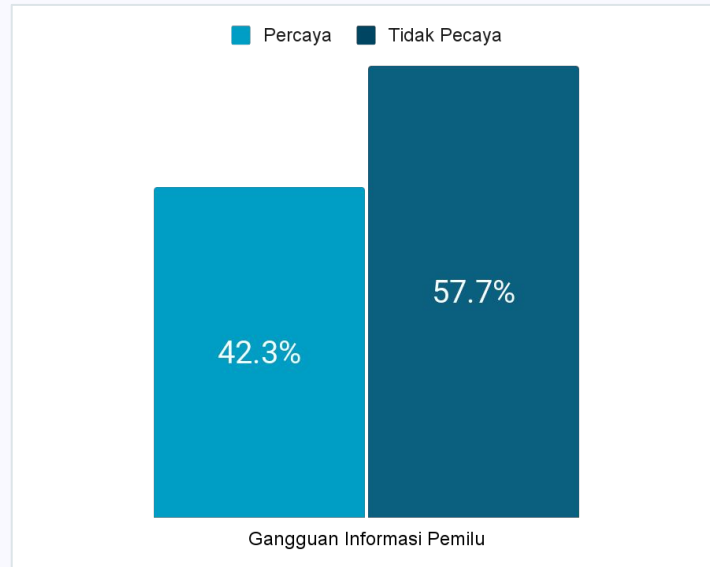
1. Pengelabuan jumlah pemilih
2. Anggota KPU tidak netral
3. Surat suara yang sudah dicoblos
4. Pencurian surat suara
5. KTP palsu dalam pemilu
6. TKA China sebagai pemilih
7. Pemilu 2024 ditunda

Pengukuran terhadap gangguan informasi non-pemilu

1. Covid senjata pembunuh massal
2. Logo halal diganti gambar wayang
3. Kebangkitan PKI
4. Vaksin Covid-19 ditanam chip
5. Bumi datar
6. UU TPKS untuk melegalkan seks bebas
7. Presiden Rusia Vladimir Putin masuk Islam

*Informasi salah yang diuji dalam survei ini adalah informasi-informasi yang sudah terverifikasi sebagai berita salah/palsu oleh koalisi CekFakta dan berulang, atau mempunyai pola yang jelas.

Tingkat Kepercayaan pada Gangguan Informasi*



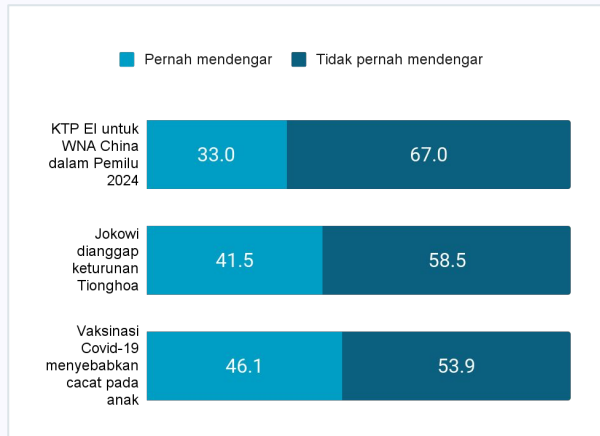
Gangguan informasi pemilu dan non-pemilu masih tinggi, hampir setengah dari responden mengaku percaya pada informasi salah

*dihitung berdasarkan kepercayaan terhadap satu, atau lebih dari gangguan informasi yang ditanyakan. Pada gangguan informasi pemilu dan non-pemilu terdapat 7 aspek yang ditanyakan.



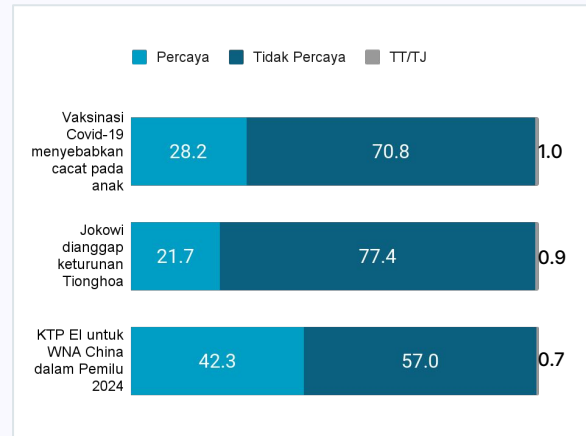
Pengukuran 2: Kepercayaan Publik terhadap Gangguan Informasi yang Telah Lama Beredar

Paparan terhadap gangguan informasi yang telah lama beredar



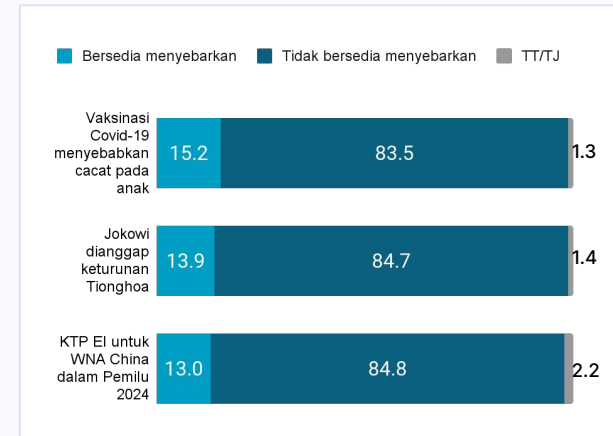
Gangguan informasi diatas mampu bertahan di benak publik dalam jangka waktu yang panjang.

Kepercayaan terhadap isu gangguan informasi (hanya tanyakan kepada responden yang pernah mendengar)



Tingkat kepercayaan terhadap gangguan informasi tersebut masih relatif tinggi, bahkan setelah dilakukan pengecekan fakta atau klarifikasi.

Pernah menyebarkan gangguan informasi (hanya ditanyakan kepada responden yang pernah mendengar dan percaya misinformasi)

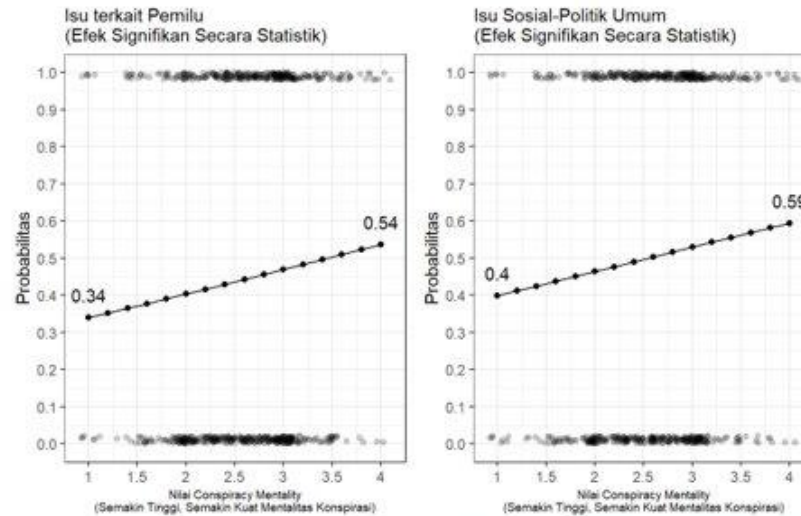


Hanya sebagian kecil dari publik yang percaya terhadap gangguan informasi, tertarik untuk menyebarkannya. Ini mengindikasikan bahwa adanya gerakan terencana untuk menyebarkan gangguan informasi.



Pengukuran 3: Mentalitas Konspirasi (Perasaan Curiga) dan Pengaruhnya terhadap Gangguan Informasi

Probabilitas Mempercayai Kebenaran Setidaknya Satu Informasi Salah



Dikalkulasi dari model regresi logistik yang mengontrol jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, perkotaan, residensi di pulau Jawa.

Perasaan curiga dapat meningkatkan peluang seseorang untuk percaya pada gangguan informasi. Pengukuran ini diadopsi dari lima pertanyaan *Conspiracy Mentality* dari Imhoff et al. (2022). Semakin tinggi nilai *Conspiracy Mentality*, semakin kuat tendensi responden untuk percaya dengan hal-hal konspirasi. *Conspiracy Mentality* secara signifikan memprediksi kepercayaan terhadap gangguan informasi.

BAGIAN 3

Eksposur Internet dan Kepercayaan pada Gangguan Informasi

Secara umum temuan survei menunjukkan bahwa **exposure** internet mempengaruhi kepercayaan atau ketidakpercayaan pada gangguan informasi

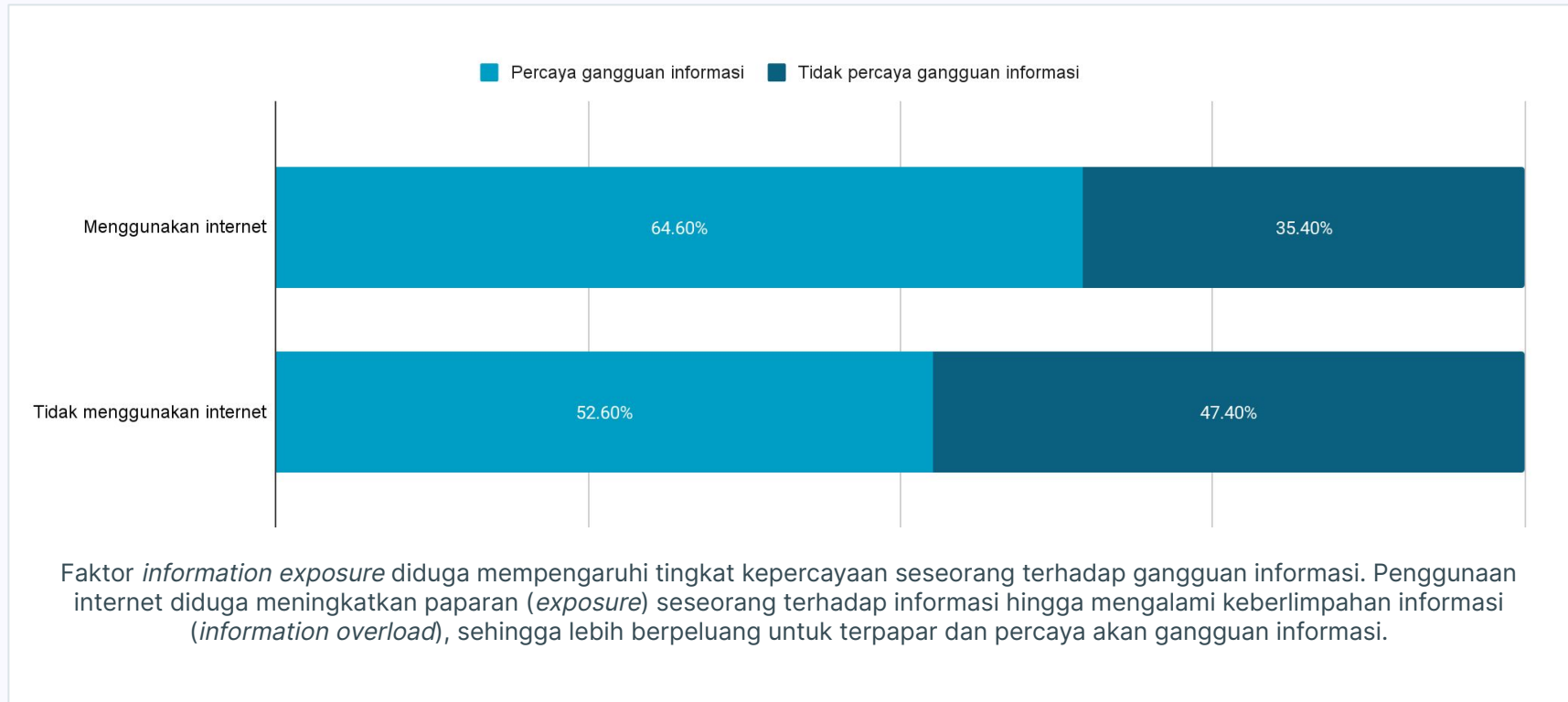


CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES

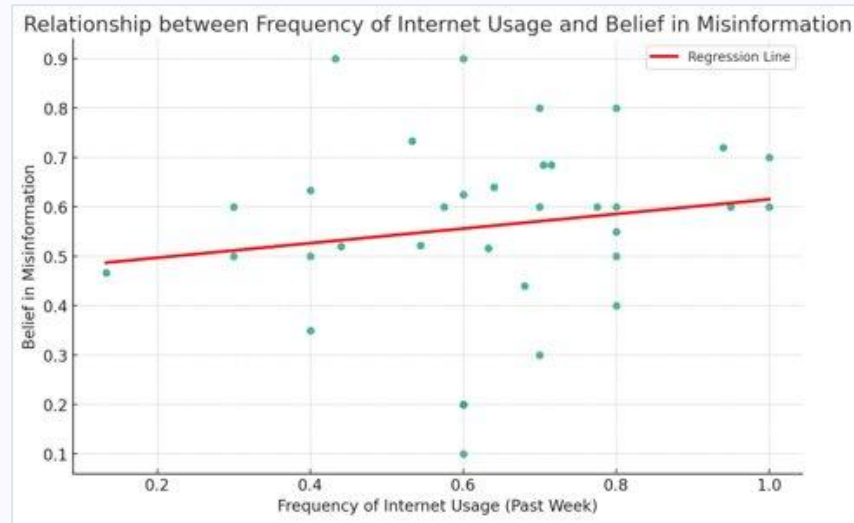


Google

Pengguna Internet x Gangguan Informasi



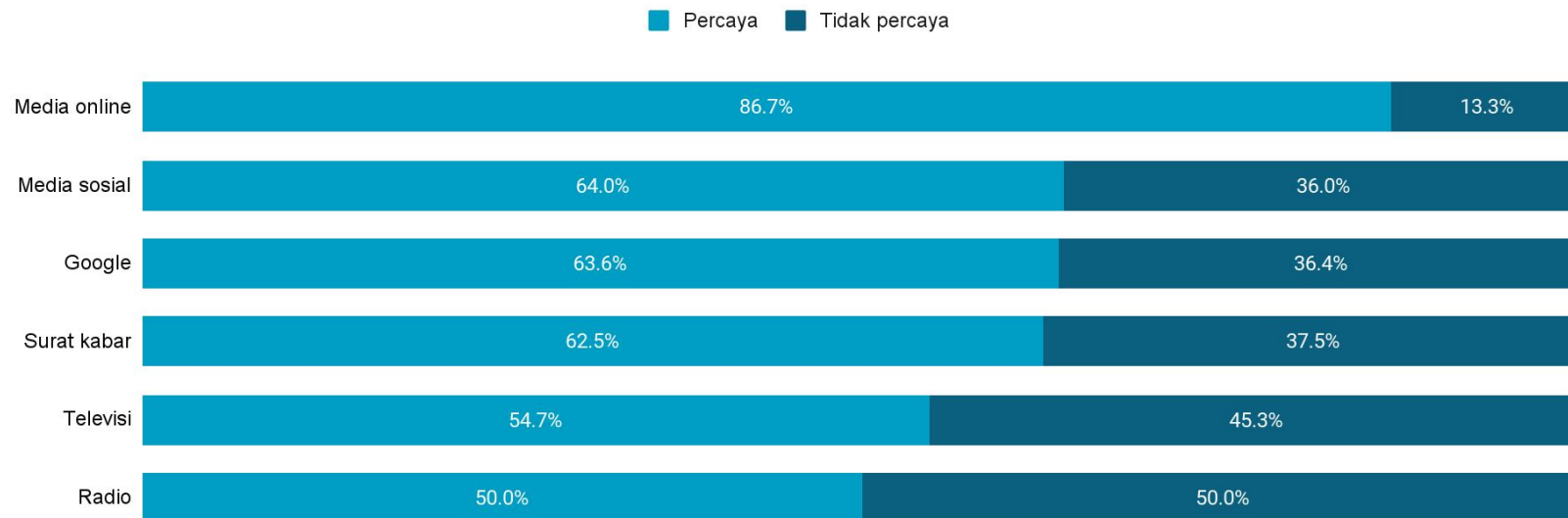
Korelasi antara Penggunaan Internet dan Kepercayaan pada Gangguan Informasi



Dari grafik, kita melihat hubungan antara frekuensi penggunaan internet dalam seminggu terakhir dan kepercayaan pada gangguan informasi. Garis merah menunjukkan tren keseluruhan dari data tersebut.

Meskipun ada sedikit kemiringan positif pada garis, titik-titik data tampak cukup tersebar. Meskipun ada sedikit korelasi positif antara dua variabel tersebut, analisis regresi menunjukkan bahwa hubungan tersebut mungkin tidak signifikan secara statistik. Korelasi tidak menunjukkan sebab-akibat dan faktor lain yang tidak dipertimbangkan dalam dataset ini mungkin mempengaruhi kepercayaan pada gangguan informasi.

Sumber Rujukan Informasi x Gangguan Informasi



Faktor *information exposure* diduga mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang terhadap gangguan informasi. Penggunaan internet diduga meningkatkan paparan (*exposure*) seseorang terhadap informasi hingga mengalami keberlimpahan informasi (*information overload*), sehingga lebih berpeluang untuk terpapar dan percaya akan gangguan informasi.

BAGIAN 4

Profil Demografi Sebaran Gangguan Informasi

Hasil survei ini memotret profil demografi penyebaran gangguan informasi yang belum tentu menunjukkan hubungan sebab-akibat, meskipun terdapat kecenderungan tertentu.

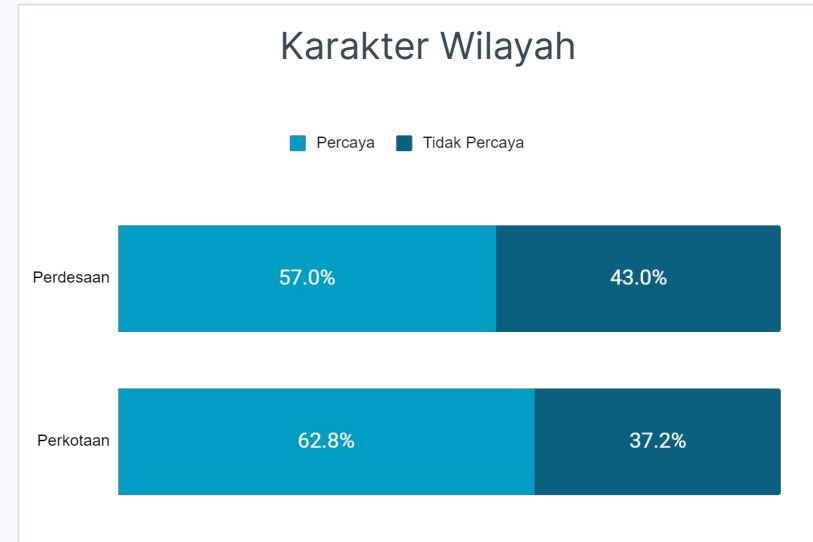
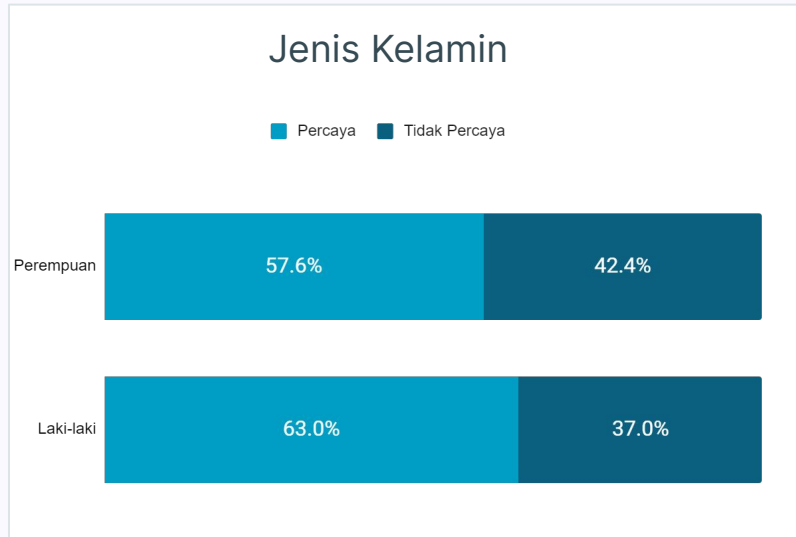


CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Google

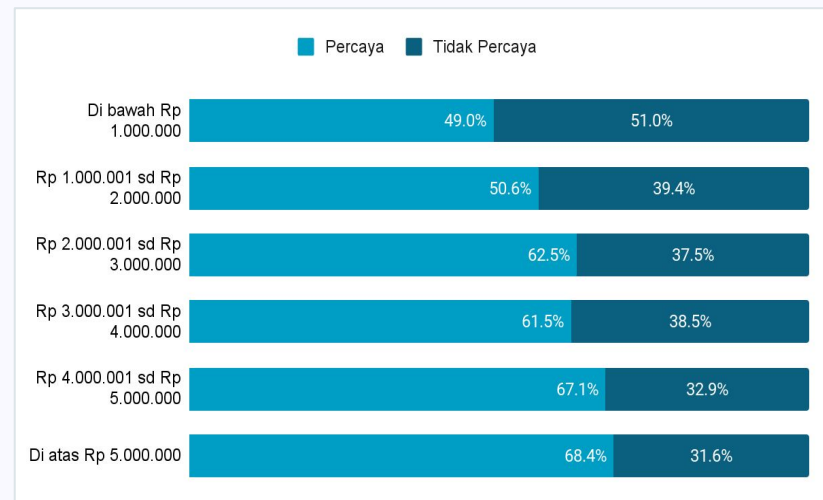
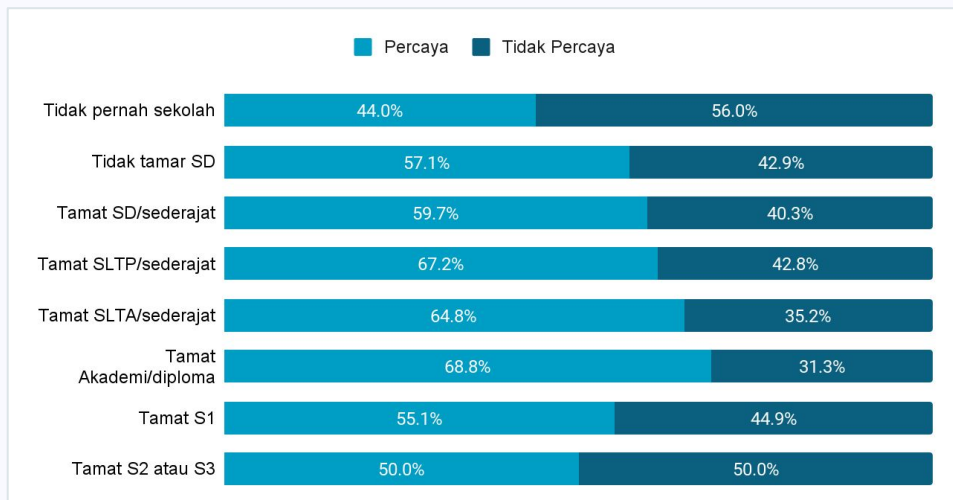
Tingkat Kepercayaan pada Gangguan Informasi Pemilu dan Non Pemilu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Karakter Wilayah



Hasil survei menyatakan bahwa ada kecenderungan lebih banyak laki-laki (63 persen) dibandingkan perempuan (57,6 persen) yang mempercayai gangguan informasi.

Kemudian, ada kecenderungan lebih banyak masyarakat di perkotaan (62,8 persen) yang mempercayai gangguan informasi dibandingkan masyarakat di pedesaan (57 persen). Hal tersebut bisa dikarenakan faktor *information exposure* di mana masyarakat di perkotaan memiliki akses kepada informasi yang lebih besar dibandingkan yang tinggal di pedesaan.

Tingkat Kepercayaan pada Gangguan Informasi Pemilu dan Non Pemilu Berdasarkan Pendidikan dan Pengeluaran

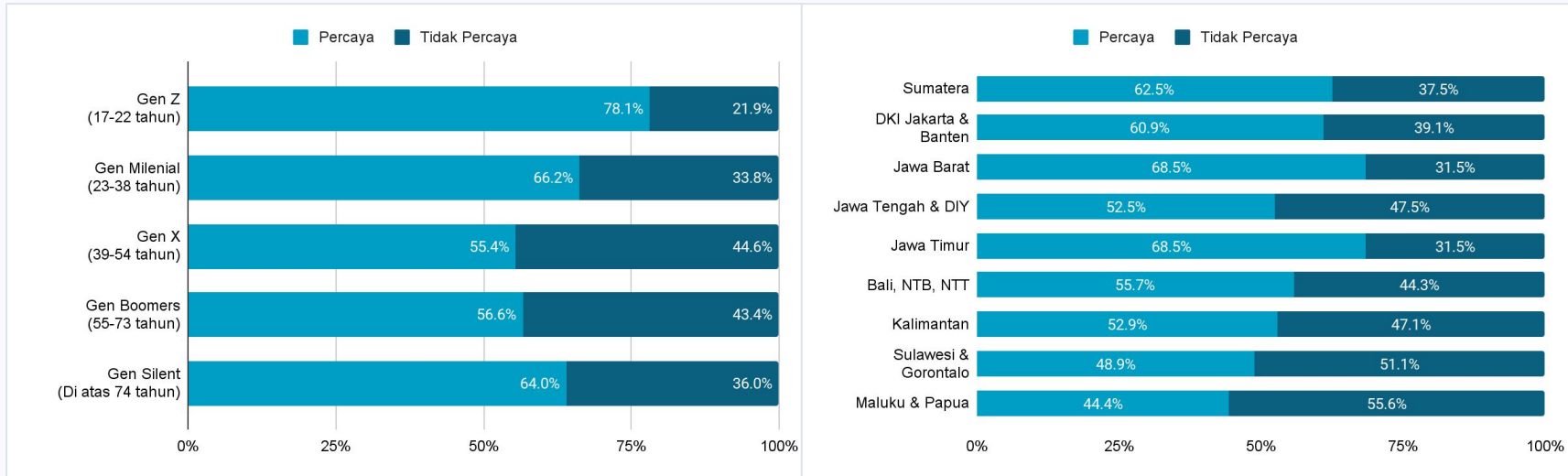


Faktor pendidikan tidak konklusif menjelaskan peluang seseorang untuk mempercayai gangguan informasi. Di sisi lain, semakin tinggi pengeluaran seseorang, lebih tinggi kemungkinan mereka mempercayai misinformasi.

Namun, hal ini tidak bisa disebutkan sebagai sebuah sebab-akibat. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor *information exposure* dimana publik yang memiliki pengeluaran lebih tinggi adalah yang mendapatkan akses ke lebih banyak informasi, dan kemudian mendapat lebih banyak kesempatan untuk terpapar gangguan informasi.



Tingkat Kepercayaan pada Gangguan Informasi Pemilu dan Non Pemilu Berdasarkan Generasi dan Wilayah



Kepercayaan terhadap gangguan informasi cenderung paling tinggi di kelompok usia Gen Z (78,1 persen) dan milenial (66,2 persen).

Dibandingkan wilayah lain, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki jumlah kepercayaan terhadap gangguan informasi yang cenderung tinggi (68,5 persen). Hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh faktor *information exposure* di mana generasi muda dan publik di pulau Jawa bagian Barat dan Timur memiliki lebih banyak akses pada informasi.

Peta Sebaran Akses Internet per Provinsi*



***Disclaimer:** pemetaan ini berusaha menunjukkan pola pada setiap provinsi, bukan untuk melakukan generalisasi karena sebaran sampel yang kecil bila data di-*breakdown* pada level provinsi.

Akses internet yang berbeda-beda pada setiap provinsi diperkirakan mempengaruhi level kepercayaan/ketidakpercayaan seseorang pada gangguan informasi. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik yang tinggal di wilayah Indonesia memiliki akses internet.

Peta Sebaran Tingkat kepercayaan pada Gangguan Informasi per Provinsi*



Tingkat kepercayaan terhadap misinformasi

Berdasarkan rata-rata nilai di level provinsi



***Disclaimer:** pemetaan ini berusaha menunjukkan pola pada setiap provinsi, bukan untuk melakukan generalisasi karena sebaran sampel yang kecil bila data di-breakdown pada level provinsi.

Map: CSIS - Source: Safer Internet Lab - Created with Datawrapper

Sebagian besar provinsi memiliki tingkat kepercayaan terhadap misinformasi yang sama dengan/di atas rata-rata.

Seluruh provinsi di pulau Jawa dan Bali memiliki tingkat kepercayaan misinformasi di atas rata-rata. Tingkat kepercayaan terhadap gangguan informasi dipetakan berdasarkan wilayah, namun tingkat tersebut mungkin bisa dijelaskan oleh faktor *information exposure* dimana setiap provinsi memiliki frekuensi akses internet yang berbeda, dan yang lebih banyak terpapar informasi juga memiliki kemungkinan lebih besar terpapar akan gangguan informasi.

BAGIAN 5

Kerentanan Publik terhadap Gangguan Informasi

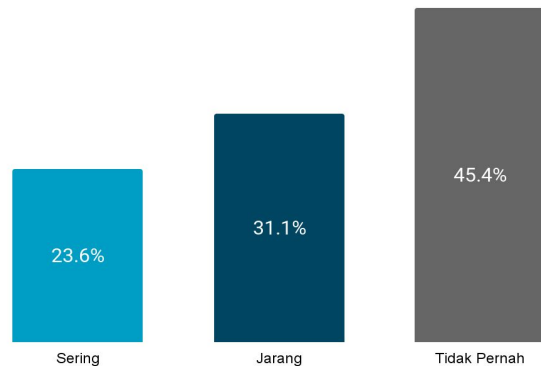


Kerentanan 1: Rendahnya tingkat verifikasi informasi secara mandiri



Secara umum seberapa seringkah Anda **mengecek kembali kebenaran informasi** tertentu sebelum membagikannya ke orang lain? (dalam persen)

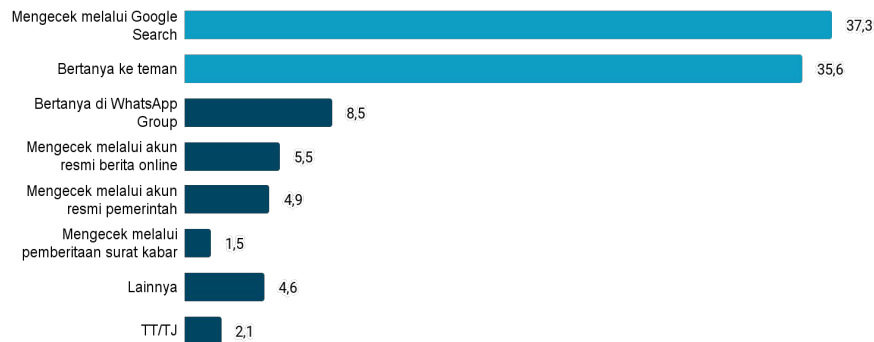
Mengecek kebenaran informasi



Kesadaran publik untuk mengecek kembali kebenaran informasi masih rendah dan itu dapat meningkatkan paparan seseorang terhadap gangguan informasi. Itu tampak dari hanya 23,6 persen responden yang sering mengecek informasi.

Cara publik dalam mengecek informasi | N= 721

(bagi yang pernah (sering/jarang) mengecek informasi)



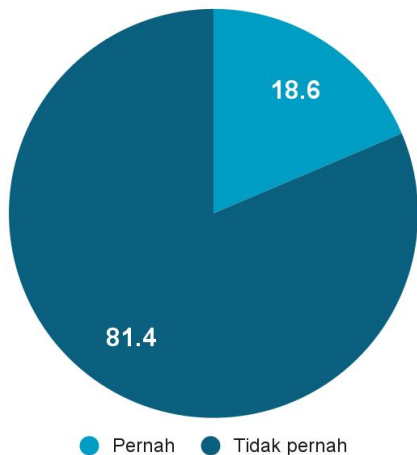
Search engine (Google) dan bertanya ke teman dianggap salah satu medium penting untuk mengecek kebenaran informasi.

Kerentanan 2: Rendahnya Akses Publik terhadap Medium Pengecekan Fakta



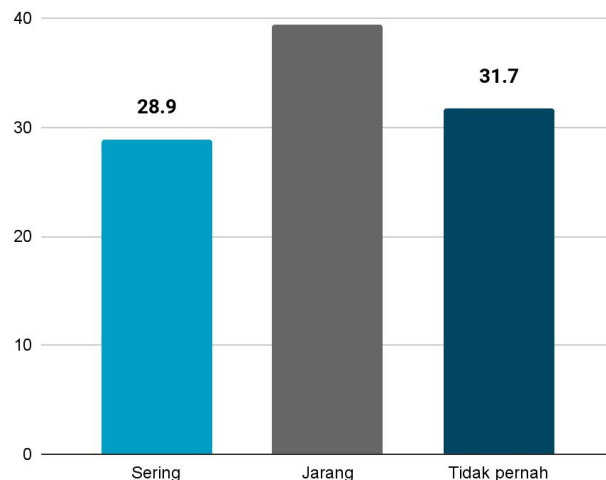
Apakah Anda pernah atau tidak pernah membaca hasil koreksi berita bohong baik di situs resmi pemerintahan, media massa, atau organisasi pemeriksa fakta? (dalam persen)

Mengunjungi situs pengecekan fakta



Sosialisasi pengecekan fakta masih harus ditingkatkan. Hal itu tampak dari sebagian besar dari publik (81,4 persen) tidak pernah membaca hasil koreksi berita bohong oleh lembaga-lembaga verifikasi fakta.

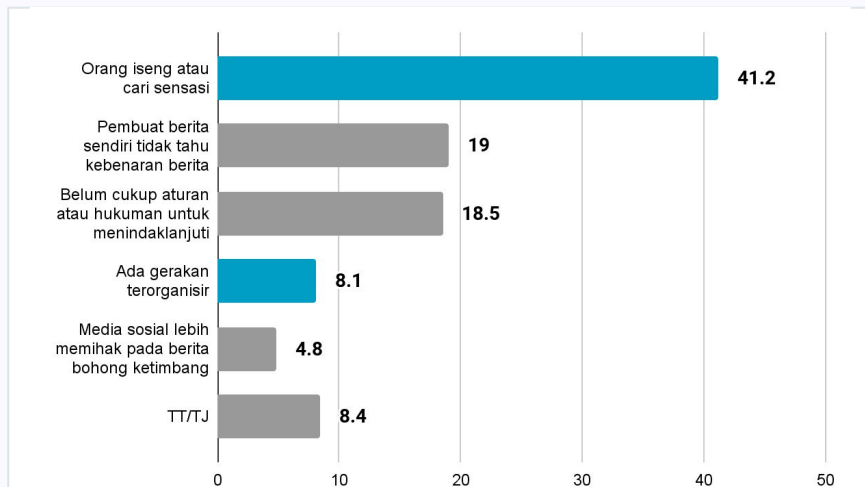
Membagikan hasil koreksi berita
N=246 (bagi yang pernah mengecek fakta)



Kebiasaan untuk membagikan hasil koreksi berita bohong masih rendah, 39,4 persen mengatakan jarang melakukan dan 31,7 persen tidak pernah.

Kerentanan 3: Sebagian Besar Publik tidak Menyadari bahwa Gangguan Informasi adalah Gerakan Terorganisir dan Terstruktur

Secara umum menurut pendapat Anda, mengapa banyak berita bohong yang tersebar di internet/media sosia?

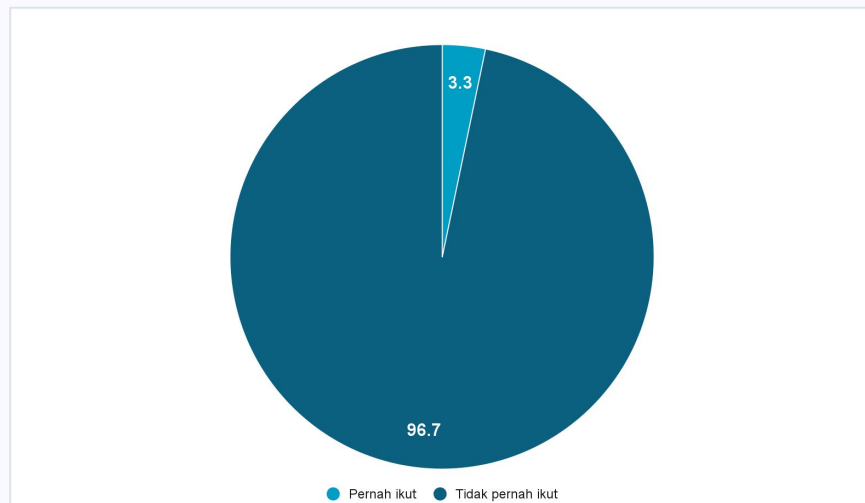


Publik tidak banyak mengetahui bahwa gangguan informasi adalah gerakan yang terstruktur dan terorganisir. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik justru beranggapan bahwa gangguan informasi disebabkan oleh tindakan orang iseng/cari sensasi.

Kerentanan 4: Pentingnya Peningkatan Akses Publik terhadap Program Literasi Informasi



Apakah Anda pernah mengikuti program literasi informasi seperti pelatihan atau seminar untuk pengecekan fakta?



Program literasi informasi, baik yang diprakarsai oleh pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil masih perlu lebih banyak menjangkau pemilih lintas demografi dan provinsi.

BAGIAN 5

Dampak Gangguan Informasi

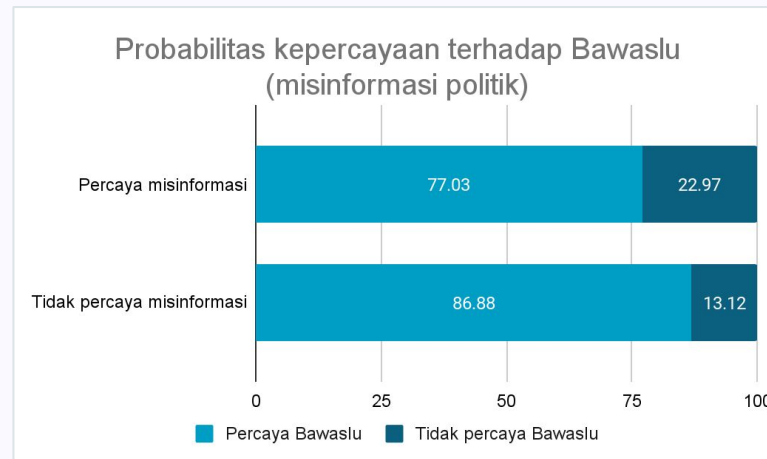
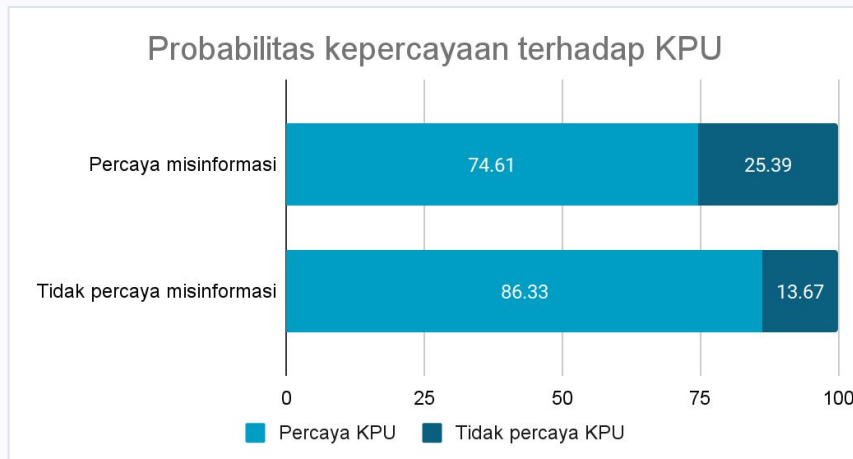


CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



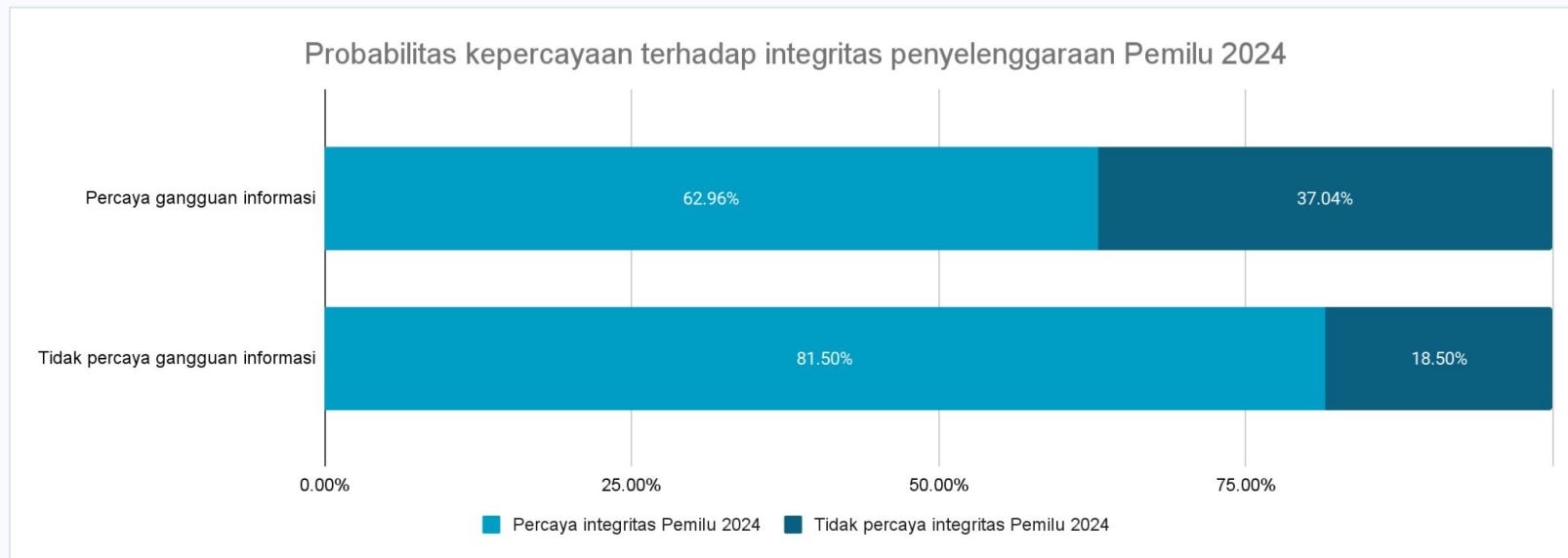
Google

Dampak 1: Gangguan Informasi Berpotensi Mengurangi Kepercayaan Publik pada Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu)*



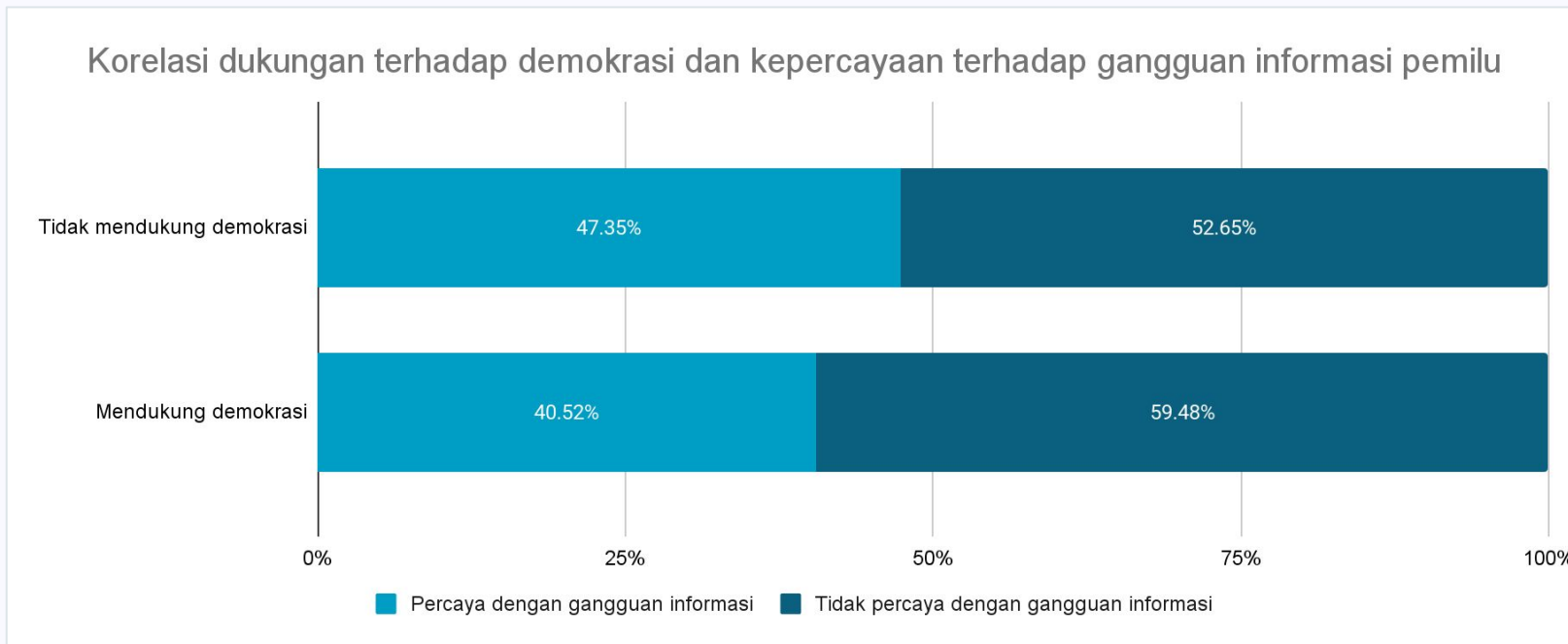
*Kepercayaan terhadap gangguan informasi menurunkan probabilitas kepercayaan terhadap KPU sebanyak 11,72 persen dan kepercayaan terhadap Bawaslu sebanyak 9,85 persen. Hasil tersebut dikalkulasi dari model regresi logistik yang mengontrol aspek-aspek sosio-demografis seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pengeluaran, agama, perkotaan, dan residensi.

Dampak 2: Gangguan Informasi Berpotensi Mengurangi Kepercayaan Publik terhadap Integritas Penyelenggaraan Pemilu*



*Kepercayaan terhadap gangguan informasi menurunkan probabilitas kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu 2024 sebanyak 18,54 persen. Hasil tersebut dikalkulasi dari model regresi logistik yang mengontrol aspek-aspek sosio-demografis seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pengeluaran, agama, perkotaan, dan residensi.

Dampak 3: Gangguan Informasi Berpeluang Mengurangi Dukungan Publik terhadap Demokrasi



*Dari hasil tabulasi silang, tampak bahwa kepercayaan terhadap gangguan informasi berkorelasi terhadap berkurangnya dukungan terhadap demokrasi sebanyak 6,83 persen.

BAGIAN 6

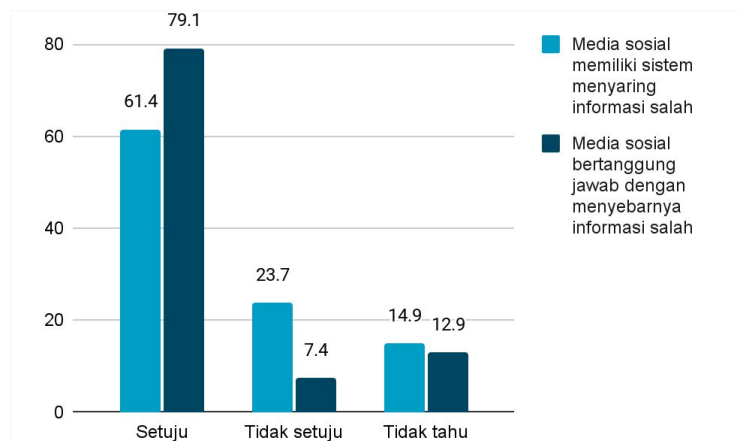
Mitigasi untuk Melawan Penyebaran Gangguan Informasi



Kolaborasi Pemerintah, Platform Teknologi, dan Masyarakat Sipil dalam Tata Kelola Internet

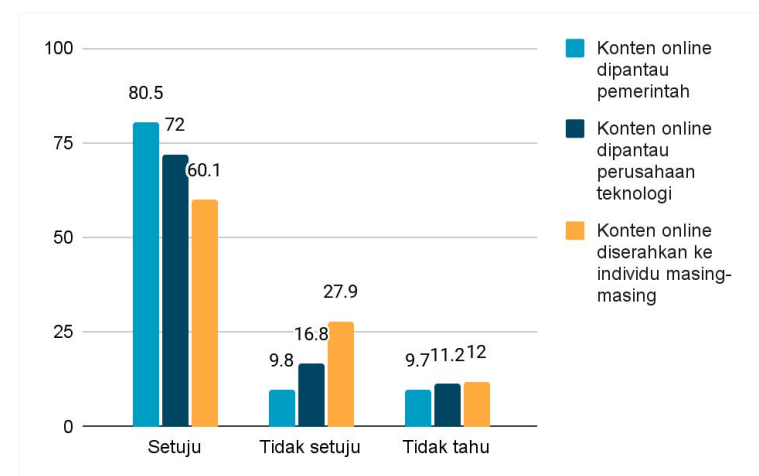


Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan hal di bawah ini? (dalam persen)



Sebagian publik telah menyadari sistem yang tersedia dalam platform media sosial untuk menyaring informasi (61,4). Di saat yang sama, publik berpendapat bahwa media sosial perlu turut berperan dalam menangani gangguan informasi (79,7 persen).

Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan hal di bawah ini? (dalam persen)

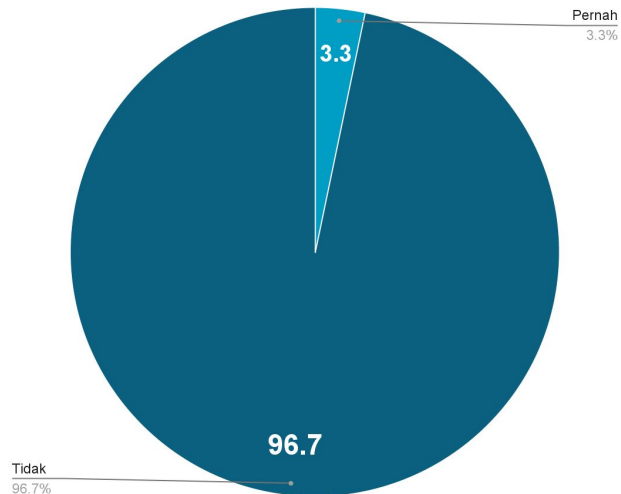


Publik menginginkan peran bersama antara pemerintah dan perusahaan teknologi dalam memperbaiki tata kelola internet ke depan.

Pentingnya Meningkatkan *Awareness* Publik untuk Menggunakan Sistem Pelaporan Informasi Salah di Media Sosial



Apakah Anda pernah melaporkan adanya berita salah menggunakan sistem pelaporan di media sosial? (dalam persen)



Hanya 3,3 persen responden yang menyatakan pernah menggunakan sistem pelaporan berita salah di platform-platform media sosial.

Kesimpulan



- Penggunaan internet dan penetrasi media sosial **telah meningkat signifikan dari 2019 hingga 2023**. Namun, paparan publik terhadap gangguan informasi masih tinggi, **hampir setengah populasi mempercayai informasi yang salah**. Hal ini menuntut kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil untuk memperbaiki ekosistem informasi.
- Kerentanan publik terhadap gangguan informasi masih mengkhawatirkan, karena faktor-faktor seperti **verifikasi informasi yang rendah, akses terhadap pemeriksaan fakta yang terbatas, dan mentalitas konspirasi dapat mempercepat penyebaran informasi salah**.
- Gangguan informasi menyebar di berbagai platform, tidak hanya media sosial tetapi juga medium informasi lainnya. Meskipun penyebaran gangguan informasi tinggi, **sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa gangguan informasi kebanyakan merupakan gerakan terorganisir**.
- Pengaruh gangguan informasi yang tinggi memiliki banyak dampak buruk yang tampak dari **menurunnya dukungan publik terhadap demokrasi dan kepercayaan terhadap integritas penyelenggara pemilu**. Pendekatan kolaboratif multidimensi diperlukan untuk memitigasi dampak ini dan memperkuat proses demokrasi.
- Langkah-langkah mitigasi saat ini belum sepenuhnya efektif. **Program literasi digital perlu diperluas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat** dengan kurikulum dan tujuan yang disempurnakan untuk memberdayakan pengguna membuat penilaian sendiri terhadap informasi. **Evaluasi efektivitas kurikulum dan target literasi digital perlu dilakukan**.
- Mekanisme pemeriksaan fakta dan pelaporan di platform digital perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan penggunaan oleh publik.
- **Survei nasional yang komprehensif tentang gangguan informasi perlu dilakukan secara berkala** untuk memahami tren kerentanan dan dampak yang berkembang. Data tersebut dapat membantu pemangku kepentingan mengembangkan kebijakan dan program mitigasi yang efektif berbasis bukti.

BAGIAN 7

Profil Responden



CENTRE FOR
STRATEGIC AND
INTERNATIONAL
STUDIES



Google



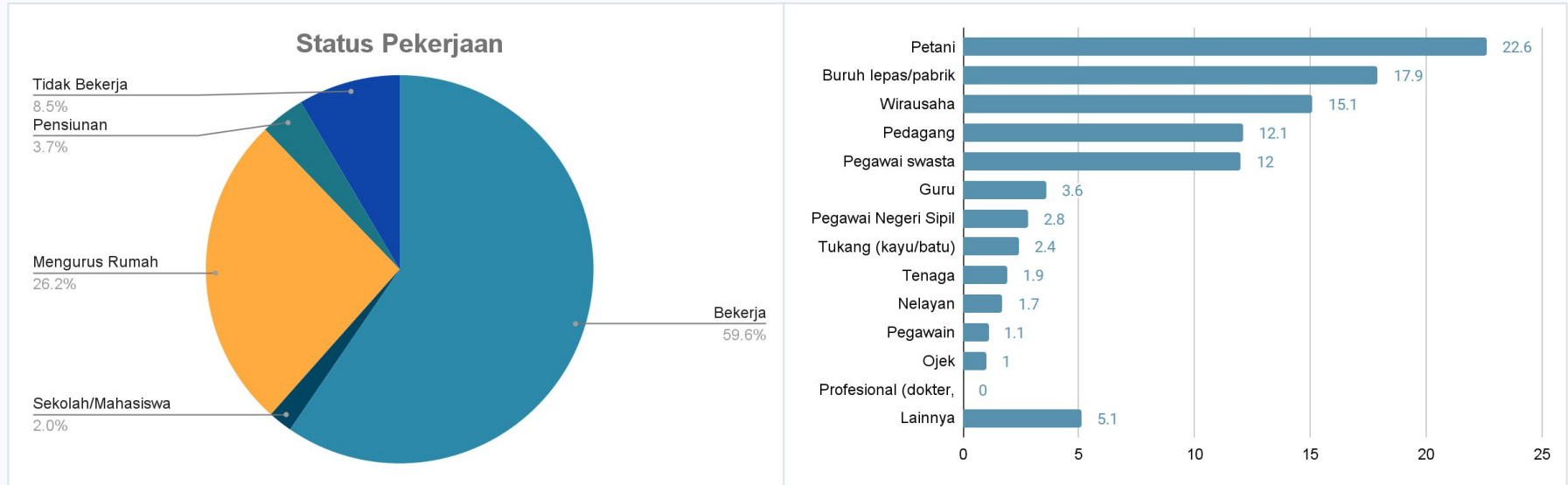
Profil responden: Agama, Suku Bangsa, Pendidikan dan Pengeluaran

Agama	Sampel
Islam	90,1
Kristen/Protestan	5,8
Katolik	1,8
Budha	0,6
Hindu	1,4
Konghucu	0,2
Suku Bangsa	Sampel
Jawa	39,8
Sunda	16,8
Melayu	6,1
Madura	4,1
Batak	4,0
Minangkabau	3,3
Aceh	2,0
Betawi	2,0
Bugis	2,0
Sasak	1,7

Suku Bangsa (lanjutan)	Sampel
Bali	1,4
Banjar	1,4
Makassar	1,1
Tionghoa	1,1
Ambon	1,0
Dayak	0,8
Timor	0,7
Papua	0,5
Lainnya	10,0

Pendidikan	
Dasar (SD/SLTP/Sederajat)	53,9
Menengah (SLTP/Sederajat)	35,5
Tinggi (Akademi/Sarjana)	10,6
Pengeluaran Rata-Rata Keluarga/Bulan	
Di bawah Rp 1.000.000	11,7
Rp 1.000.000 s.d Rp 2.000.000	36,9
Rp 2.000.001 s.d Rp 3.000.000	25,1
Rp 3.000.001 s.d Rp 4.000.000	14,2
Rp 4.000.001 s.d Rp 5.000.000	5,5
Di atas Rp 5.000.000	5,8
TT/TJ	0,8

Profil Responden: Status dan Jenis Pekerjaan



Sebanyak 59,5% responden mempunyai pekerjaan saat survei dilakukan. Dari 59,5% yang bekerja tersebut, 22,6% diantaranya bekerja sebagai petani, disusul buruh lepas/pabrik (17,9%) dan wirausaha (15,1%) sebagai tiga teratas.

Terima kasih.

Departemen Politik dan Perubahan Sosial
CSIS, 2023



Rilis Survei Opini Publik

Proyeksi dan Mitigasi Penyebaran Gangguan Informasi dalam Pemilu 2024



Disusun oleh

Arya Fernandes (CSIS)
Beltsazar A Krisetya (CSIS)
D Nicky Fahrizal (CSIS)
Nathanael Sumaktoyo (NUS)
Eriyanto (UI)
Ratna Aini Hadi (SAIL)